

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Evaluasi Pemilihan Umum Pada Proses Pencalonan Non Partai Pemilihan Kepala Daerah (Tanggapan Partai Politik Khusus DIY) dapat dijabarkan melalui hasil wawancara dengan ketua KPU Pusat Yogyakarta dan anggota partai politik seperti partai PDI-P, Golkar, Gerindra, Hanura, PAN, Demokrat, PPP, PKB, PKS, Nasdem mengenai persiapan seorang calon non partai beserta beberapa syarat administrative dan sumber daya manusia serta strategi tim sukses dalam memenangkan para calon non partai.

Tabel 3.1

Pendapat Responden tentang Persiapan Peserta PILKADA Non Partai DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	6	10,9%
2	Memuaskan (M)	16	29,1%
3	Tidak Tahu (TT)	9	16,3%
4	Kurang Memuaskan (KM)	11	20%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	13	23,7%
JUMLAH		55	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 16 responden (29,1%) menyatakan bahwa persiapan seorang calon non partai pada PILKADA di DIY adalah dalam kategori “Memuaskan”. Hal ini berarti bahwa 10 partai besar di DIY dan beberapa anggota KPU memandang bahwa para calon non partai dalam PILKADA di DIY telah memiliki persiapan yang maksimal dari segi Sumber Daya Manusia dalam menghadapi berbagai reaksi positif dan negative dari masyarakat Yogyakarta.

Disatu sisi sebanyak 11 responden (20%) menyatakan bahwa persiapan seorang calon non partai pada PILKADA di DIY adalah dalam kategori “Kurang Memuaskan” yang berarti bahwa para calon non partai akan dihadapkan suatu permasalahan yaitu pada saat terjadi kesinergisan program pemerintahan dengan partai-partai besar seperti Partai Demokrat, PDI-P, PAN, Gerindra, Hanura, PPP, PKB, Golkar, PKS, dan Nasdem.

Tabel 3.2

Pendapat Responden tentang Kemampuan Kepemimpinan Peserta
PILKADA Non Partai DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	1	1,9%
2	Memuaskan (M)	23	41.8%
3	Tidak Tahu (TT)	10	18,1%
4	Kurang Memuaskan (KM)	16	29%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	5	9,1%
JUMLAH		55	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 23 responden (41,8%) menyatakan bahwa persiapan syarat kemampuan kepemimpinan dari calon non partai di PILKADA Yogyakarta adalah dalam kategori “Memuaskan”. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 10 anggota partai politik dan KPU di Yogyakarta berpendapat bahwa seorang calon non partai di DIY telah memiliki kemampuan dalam memimpin suatu area yang menjadi wewenangnya adalah baik dari segi aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosal, dan budaya dari komunitas yang dipimpin.

Disatu sisi sebanyak 16 responden (29%) menyatakan bahwa persiapan syarat kemampuan kepemimpinan dari calon non partai di PILKADA Yogyakarta adalah dalam kategori “Kurang Memuaskan” hal ini berarti bahwa sebagian besar 10 anggota partai politik dan KPU di Yogyakarta menyatakan bahwa para calon independen tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan secara politik pada para partai politik besar sehingga akan mengakibatkan tidak adanya dukungan dari para partai politik tersebut pada saat menjalankan setiap kebijakannya.

Tabel 3.3

Pendapat Responden tentang Syarat Administrasi Peserta PILKADA Non
Partai DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	1	1,9%
2	Memuaskan (M)	11	20%
3	Tidak Tahu (TT)	15	27,2%
4	Kurang Memuaskan (KM)	20	36,3%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	8	14,6%
JUMLAH		55	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 20 responden (36,3%) menyatakan bahwa persyaratan administrasi calon non partai PILKADA DIY adalah dalam kategori “Kurang Memuaskan”.Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota partai politik dan KPU Yogyakarta memersepsikan kemampuan dalam memenuhi persyaratan administrasi seperti yang ditetapkan dalam PKPU No 9 2015 oleh calon non partai belum bisa dipenuhi secara maksimal.

Tabel 3.4

Pendapat Responden tentang Kemampuan Peserta PILKADA Non Partai
Menghadapi Kemungkinan Demonstrasi Di DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	2	3,7%
2	Memuaskan (M)	17	30,9%
3	Tidak Tahu (TT)	14	25,4%
4	Kurang Memuaskan (KM)	15	27,2%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	7	12,8%
JUMLAH		55	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 17 responden(30,9%) menyatakan bahwa kemampuan calon peserta non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi pada PILKADA di DIY adalah dalam kategori “Memuaskan”. Hal ini berarti bahwa para anggota partai politik dan KPU Yogyakarta menyaktakan demonstrasi oleh masyarakat Yogyakarta adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam suatu kepemimpinan dari respon demokrasi sehingga hal ini dipandang wajar oleh para calon non partai.

Disatu sisi sebanyak 15 responden (27,2%) menyatakan bahwa kemampuan calon peserta non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi pada PILKADA di DIY adalah dalam kategori “Kurang Memuaskan” hal ini berarti bahwa sebagian besar 10 anggota partai politik dan KPU di Yogyakarta menyatakan bahwa calo non partai dipandang akan mengalami kesulitan dalam menghadapi masa demonstrasi karena

berdasarkan pengalaman sebelumnya masa demonstrasi hanya bisa dihadapi oleh partai politik dimana partai politik tersebut juga dapat melakukan rekayasa demonstrasi.

Tabel 3.5

Pendapat Responden tentang Kemampuan Peserta PILKADA Non Partai Menghadapi Kemungkinan Konflik Kebijakan Antar Partai Di DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	3	5,4%
2	Memuaskan (M)	8	14,6%
3	Tidak Tahu (TT)	19	34,6%
4	Kurang Memuaskan (KM)	10	18,1%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	15	27,2%
JUMLAH		55	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 19 responden (34,6%) menyatakan bahwa kemampuan calon non partai di PILKADA DIY dalam menghadapi kemungkinan konflik kebijakan antar partai adalah dalam kategori “Tidak Tahu”. Hal ini berarti bahwa anggota KPU dan partai politik di DIY menilai apabila visi dan misi kepemimpinan calon non partai akan didukung oleh beberapa partai politik yang memiliki kesamaan visi dan misi sedangkan calon non partai tidak akan memiliki dukungn partai politik dengan visi serta misi yang berbeda.

Disatu sisi calon non partai juga akan menghadapi konflik kebijakan antar partai karena para calon non partai tidak memiliki bentuk kepemimpinan seperti partai politik dan mereka hanya didukung oleh

organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, FPI, HMI, dan lain-lain.

Tabel 3.6

Pendapat Responden tentang Strategi Tim Independen Menghadapi Demo Di DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	2	3,7%
2	Memuaskan (M)	9	16,3%
3	Tidak Tahu (TT)	25	45,4%
4	Kurang Memuaskan (KM)	16	29,1%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	3	5,5%
JUMLAH		55	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 25 responden (45,4%) menyatakan bahwa strategi tim independen yang dipakai oleh calon non partai di PILKADA Yogyakarta dalam menghadapi demo adalah dalam kategori “Tidak Tahu”. Hal ini berarti bahwa KPU dan anggota partai politik menganggap para tim sukses calon non partai hanya berfokus pada tugasnya untuk memenangkan suara calon non partai diluar persiapannya dalam menhadapi demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasan dari para pemilih mengenai kemampuan kepemimpinan calon non partai yang dimenangkannya.

Dilain pihak, para tim independen juga meyakini bahwa masa demonstrasi merupakan suatu aktifitas rekayasa dari lawan politik dengan upaya subsidi biaya spanduk, membakar ban, kerusuhan, dan lain-lain.

Tabel 3.7

Pendapat Responden tentang Strategi Tim Independen Menghadapi
Konflik Sosial Masyarakat Di DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	5	9,1%
2	Memuaskan (M)	5	9,1%
3	Tidak Tahu (TT)	16	29,1%
4	Kurang Memuaskan (KM)	28	50,9%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	1	1,9%
JUMLAH		55	100,1%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 28 responden (50,9%) menyatakan bahwa strategi tim independen yang dipakai oleh calon peserta dalam menghadapi konflik sosial masyarakat di PILKADA Yogyakarta adalah dalam kategori “Kurang Memuaskan”. Hal ini berarti bahwa KPU dan anggota partai politik menganggap para tim sukses calon non partai hanya berfokus pada tugasnya untuk memenangkan suara calon non partai namun para tim sukses calon non partai tidak begitu bisa meyakinkan pemikiran masyarakat mengenai arah dan dasar kepemimpinan kedepan para calon non partai apabila terpilih sehingga terwujud suatu konflik sosial.

Para anggota partai politik dan KPU juga berpendapat bahwa kemampuan calon independen dalam menghadapi konflik sosial dinilai “Kurang Memuaskan” karena kualitas konflik sosial sangatlah beragam seperti konflik suku, agama, ras, dan golongan dimana semua konflik

tersebut dapat menciptakan tindakan kriminal sehingga para calon non partai diharuskan memiliki mental dan kemampuan komunikasi yang mumpuni pada bentuk masyarakat yang berbeda untuk meredam konflik sosial.

Tabel 3.8

Pendapat Responden tentang Kemampuan Tim Sukses Dalam Hitung Cepat Di DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	5	9,1%
2	Memuaskan (M)	17	31%
3	Tidak Tahu (TT)	9	16,3%
4	Kurang Memuaskan (KM)	14	25,4%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	10	18,1%
JUMLAH		55	99,9%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 17 responden (31%) menyatakan bahwa kemampuan observasi tim sukses dalam menghadapi hitung cepat di PILKADA calon non partai DIY adalah dalam kategori “Memuaskan”. Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota partai politik dan KPU Yogyakarta jika para tim sukses calon non partai diyakini telah memiliki ruang lingkup lembaga survey dalam menghitung suara pemenangan PILKADA sebelum pernyataan rekapitulasi KPU mengenai jumlah suara yang sah.

Namun para anggota partai politik dan KPU sebanyak 17 responden (31%) menyatakan bahwa kemampuan tim kemampuan observasi tim

sukses dalam menghadapi hitung cepat di PILKADA calon non parti DIY adalah dalam kategori “Kurang Memuaskan” yang berarti bahwa kemampuan tim sukses tersebut dalam menghadapi hitung cepat tidak berdasarkan pada program survey yang tepat dan sebagian besar para tim sukses calon independen hanya mengandalkan orang-orang terdekatnya untuk melakukan proses hitung cepat dengan insentif yang telah ditetapkan oleh tim sukses.

Tabel 3.9

Pendapat Responden tentang Kemampuan Tim Sukses Dalam Hitung Manual Di DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	1	1,9%
2	Memuaskan (M)	18	32,8%
3	Tidak Tahu (TT)	11	20%
4	Kurang Memuaskan (KM)	20	36,3%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	5	9,1%
JUMLAH		55	100,1%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 20 responden (36,3%) menyatakan bahwa kemampuan observasi tim sukses dalam menghadapi hitung manual di PILKADA DIY adalah dalam kategori “Kurang Memuaskan”. Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota partai politik dan KPU Yogyakarta menilai proses hitung manual dari para tim sukses tidak akan terlepas

dari padangan “*human eror*” dari segi tenaga, pikiran, waktu dan anggaran sehingga hasil hitung manual oleh para tim sukses calon non partai masih meragukan.

Tabel 3.10

Pendapat Responden tentang Kemampuan Peserta PILKADA Non Partai Untuk Persiapan Pembangunan Ekonomi Di DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	6	10,9%
2	Memuaskan (M)	13	23,7%
3	Tidak Tahu (TT)	16	29,1%
4	Kurang Memuaskan (KM)	16	29,1%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	4	7,2%
JUMLAH		55	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 16 responden (29,1%) menyatakan bahwa kemampuan calon non partai di PILKADA di DIY dalam mempersiapkan pembangunan ekonomi adalah dalam kategori “Tidak Tahu” dan “Kurang Memuaskan”. Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota partai politik dan KPU Yogyakarta meyakini kemampuan calon non partai dalam memahami situasi kondisi pergolakan ekonomi di Yogyakarta terkait dengan profil pekerjaan atau jabatan yang tidak diketahui oleh anggota partai politik dan KPU karena kurang familier sedangkan sebagian anggota partai politik dan KPU meyakini sebagian besar masyarakat Yogyakarta mengetahui profil atau jabatan oleh calon non partai terkait dengan menghadapi kemampuan gejala ekonomi yang

dipandang tidak sesuai dengan pekerjaan dan jabatannya dalam mengelola ekonomi daerah.

Tabel 3.11

Pendapat Responden tentang Peserta PILKADA Non Partai
Mempersiapkan Kemampuan Politik Di DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	5	9,1%
2	Memuaskan (M)	18	32,8%
3	Tidak Tahu (TT)	14	25,4%
4	Kurang Memuaskan (KM)	15	27,2%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	3	5,4%
JUMLAH		55	99,9%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 18 responden (32,8%) menyatakan bahwa calon non partai PILKADA dalam mempersiapkan kemampuan politik di DIY adalah dalam kategori “Memuaskan”. Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota partai politik dan KPU Yogyakarta menanggapi para calon non partai telah memiliki ruang lingkup rekan politikus yang terjalin sebelumnya serta telah berperan aktif dalam aktivitas politik di DIY dalam waktu tertentu.

Tabel 3.12

Pendapat Responden tentang Persiapan Calon Independen
Mempertanggung jawabkan Jabatannya Menghadapi DPR DI DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	6	10,9%
2	Memuaskan (M)	22	40%
3	Tidak Tahu (TT)	10	18,1%
4	Kurang Memuaskan (KM)	7	12,8%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	10	18,1%
JUMLAH		55	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 22 responden (40%) menyatakan bahwa persiapan calon independen dalam menghadapi DPR sebagai betuk pertanggung jawaban jabatan di DIY adalah dalam kategori “Memuaskan”. Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota partai politik dan KPU Yogyakarta menyikapi para calon non partai dalam bekerja sebagai kepala daerah telah terjalin relasi dengan pendukung dari kalangan politikus sebagai penasihat pribadi sekaligus adanya komunikasi yang intensif dengan sebagian besar masyarakat Yogyakarta sehingga para calon non partai dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, para calon non partai tidak perlu melakukan pendekatan terhadap partai politik mana pun dalam mempertanggungjawabkan jabatannya di hadapan DPR.

Tabel 3.13

Pendapat Responden tentang Strategi Calon Non Partai Menghadapai
Kesalahan Dalam Peristiwa Pemerintahan Di DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	5	9,1%
2	Memuaskan (M)	5	9,1%
3	Tidak Tahu (TT)	19	34,5%
4	Kurang Memuaskan (KM)	18	32,8%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	8	14,5%
JUMLAH		55	100 %

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 19 responden (34,5%) menyatakan bahwa strategi calon non partai politik pada saat menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan di DIY adalah dalam kategori “Tidak Tahu” . Hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota partai politik dan KPU Yogyakarta menilai kesalahan calon non partai saat menjabat sebagai kepala daerah adalah dalam kategori subjektif karena unsur kesalahan dalam pemerintahan hanya dapat dinilai dan dilihatoleh masyarakat.

Disatu sisi para calon non partai dimungkinkan akan mengalami banyak kesalahan dalam menjalankan pemerintahannya karena secara tidak langsung pemerintahan legislative dan eksekutif yang berasal dari golongan partai politik kurang mengakui keberadaan calon non partai dan segala kebijakannya.

Tabel 3.14

Pendapat Responden tentang Kebijakan Calon Independen Melibatkan
Pendukungnya dalam Pemerintahan Di DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	0	0%
2	Memuaskan (M)	16	29,1%
3	Tidak Tahu (TT)	16	29,1%
4	Kurang Memuaskan(KM)	17	30,9%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	6	10,9%
JUMLAH		55	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 16 responden (29,1%) menyatakan bahwa kebijakan calon independen yang melibatkan para pendukungnya dalam pemerintahan di DIY adalah dalam kategori “Memuaskan” dan “Tidak Tahu” hal ini berarti bahwa sebagian besar anggota partai politik dan KPU Yogyakarta menilai para calon independen akan melibatkan beberapa pendukung dari masyarakat yang dinilai mengetahui seluk beluk kondisi dan situasi politik ekonomi sosial dan budaya serta melibatkan beberapa kinerja pegawai negeri sipil.

Sedangkan sebagian besar anggota partai politik dan KPU Yogyakarta menyatakan para calon independen dalam kemampuannya melibatkan pendukung di pemerintahannya tidak dapat dipastikan karena golongan simpatisan atau pendukung dari calon non partai yang kurang dapat di tentukan latar belakangnya

Tabel 3.15

Pendapat Responden tentang Tingkat Setimen dari Partai Politik tentang Calon Independen Di PILKADA DIY

NO	TINGKAT JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE (%)
1	Sangat Memuaskan (SM)	6	10,9%
2	Memuaskan (M)	20	36,3%
3	Tidak Tahu (TT)	7	12,8%
4	Kurang Memuaskan (KM)	15	27,2%
5	Sangat Tidak Memuaskan (STM)	7	12,8%
JUMLAH		55	100%

Sumber: hasil penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 20 responden (36,3%) menyatakan bahwa mengenai adanya tingkat sentiment dari partai politik tentang calon independen di Yogyakarta adalah dalam kategori “Memuaskan”. Hal ini berarti bahwa sebagian besar partai politik dan KPU Yogyakarta menyatakan para calon Independen dinilai tidak memiliki wadah yang pasti dalam mewujudkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan sehingga kemungkinan besar proses pemerintahan kedepan akan bersebrangan dengan visi dan misi dari berbagai kalangan partai politik di DIY.

Sehubungan dengan keseluruhan jawaban pada kuisisioner dan hasil wawancara yang ditujukan kepada seluruh anggota Partai Politik (Partai PDI-P, Golkar, Gerindra, Hanura, PAN, Demokrat, PPP, PKB, PKS, dan Nasdem) serta anggota KPU pusat Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mengenai persiapan dalam mewujudkan kemampuan

kepemimpinan, persyaratan administrasi, kemampuan menghadapi demonstrasi dan konflik sosial, kemampuan mempersiapkan pembangunan dibidang politik dan ekonomi dari calon non partai serta kemampuan tim independen dalam mempersiapkan hitung cepat, hitung manual, dan menghadapi konflik sosial serta demonstrasi terhadap calon independen memiliki berbagai pola pikir dan tanggapan yang berbeda-beda terkait dengan unsur subjektifitas dari masing-masing partai politik dan KPU Yogyakarta.

Disatu sisi pandangan mengenai tingkat sentiment dari partai politik tentang calon independen juga memiliki peran yang signifikan dalam mempertimbangkan keseluruhan jawaban pada kuisisioner dan hasil wawancara.

B. ANALISIS

Peneliti menggunakan instrument penelitian berupa wawancara dengan para anggota partai politik dan ketua KPUD Yogyakarta untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari pencalonan non partai secara politik dan secara ekonomi pada PILKADA , perasaan ingin mempersoalkan sentiment antipartai dalam diri partai politik.Selain itu wawancara juga dilakukan penulis kepada partai politik diambil dari hasil kuisisioner yang penulis pertanyakan kepada setiap responden.

Peneliti juga menggunakan instrument berupa kuisisioner untuk mengetahui kemampuan keilmuan pemerintahan dalam diri Partai Politik

terhadap seseorang calon Independen dengan kriteria memuaskan, sangat memuaskan, kurang memuaskan, sangat tidak memuaskan dan tidak tahu.

Hasil wawancara dan data kuisisioner akan di kelompokkan kemudian di analisa secara sistematis agar diketahui sejauh mana pandangan KPU dan Partai politik di Yogyakarta dalam menyikapi kesiapan para calon non partai dari segi administrative, sumber daya manusia dan kinerja tim sukses dari masing-masing calon independen dimana hal tersebut berkaitan dengan kelangsungan PILKADA Yogyakarta dengan jalur independen.

Analisa hasil wawancara dan isi kuisisioner mengenai pencalonan non partai di kota Yogyakarta dengan para anggota partai politik dan KPU dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tanggapan Partai Politik Khusus DIY Mengenai Proses Pencalonan Non Partai

a. Partai PDI-P

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisisioner dapat disimpulkan bahwa pandangan Partai Politik PDI mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi dipandang masih kurang, sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai dipandang kurang siap

oleh Parpol PDI serta kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik, ekonomi dan sosial juga dipersepsikan kurang mampu.

Demikian juga Parpol PDI mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan juga dipandang kurang siap. Di satu sisi, Parpol PDI juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga dipandang kurang memadai.

b. Partai Golkar

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisisioner bahwa pandangan Partai Politik Golkar mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi dipandang kurang memuaskan, sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai dipandang kurang siap oleh Parpol Golkar serta kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik, ekonomi dan sosial juga dipersepsikan juga kurang siap.

Demikian juga Parpol Golkar mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan juga dipandang kurang

siap. Di satu sisi, Parpol Golkar juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga dipandang kurang memadai.

c. Partai Gerindra

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisisionerbahwa pandangan Partai Politik Gerindra mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi masih kurang diketahui, sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai masih belum diketahui oleh Parpol Gerindra serta kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik, ekonomi dan sosial juga dipersepsikan belum dapat dipastikan.

Demikian juga Parpol Golkar mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan juga masih belum diketahui persiapannya. Di satu sisi, Parpol Gerindra juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga belum dapat dipastikan kemampuannya.

d. Partai Hanura

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisisioner bahwa pandangan Partai Politik Hanura mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi dipandang masih memuaskan, sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai dipandang cukup memuaskan oleh Parpol Hanura serta kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik, ekonomi dan sosial juga dipersepsikan cukup memuaskan.

Demikian juga Parpol Hanura mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan juga dipandang juga memuaskan. Di satu sisi, Parpol Hanura juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga dipandang cukup memuaskan.

e. Partai PAN

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisisioner bahwa pandangan Partai Politik PAN mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi dipandang masih kurang memuaskan, sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai dipandang kurang siap

oleh Parpol PAN serta kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik, ekonomi dan sosial juga dipersepsikan kurang memuaskan.

Demikian juga Parpol PAN mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan juga dipandang kurang memuaskan. Di satu sisi, Parpol PAN juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga dipandang kurang memuaskan.

f. Partai Demokrat

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisioner bahwa pandangan Partai Politik Demokrat mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi dipandang telah memuaskan, sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai dipandang memuaskan oleh Parpol Demokrat serta kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik, ekonomi dan sosial juga dipersepsikan telah memuaskan.

Demikian juga Parpol Demokrat mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan juga dipandang memuaskan.

Di satu sisi, Parpol Demokrat juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga dipandang memuaskan.

g. Partai PPP

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisisioner bahwa pandangan anggota Partai Politik PPP mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi dipandang telah memuaskan namun beberapa anggota partai menyampaikan juga masih dalam tingkat kurang memuaskan dan anggota yang lain masih menyimpulkan belum bisa memastikan , sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai dipandang kurang sangat memuaskan namun beberapa anggota partai menyampaikan juga masih dalam tingkat kurang memuaskan dan anggota yang lain masih menyimpulkan belum bisa memastikan oleh Parpol PPP.

Kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik,ekonomi dan sosial juga dipersepsikan memuaskan namun beberapa anggota partai menyampaikan juga masih dalam tingkat kurang memuaskan dan anggota yang lain masih menyimpulkan belum bisa memastikan.

Demikian juga Parpol PPP mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan

jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan juga dipandang telah memuaskan namun beberapa anggota partai menyampaikan juga masih dalam tingkat kurang memuaskan dan anggota yang lain masih menyimpulkan belum bisa memastikan.

Di satu sisi, Parpol PPP juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga dipandang memuaskan namun beberapa anggota partai menyampaikan juga masih dalam tingkat kurang memuaskan dan anggota yang lain masih menyimpulkan belum bisa memastikan.

h. Partai PKB

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisisionerbahwa pandangan Partai Politik PKB mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi dipandang masih kurang memuaskan, sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai dipandang kurang siap oleh Parpol PKB serta kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik, ekonomi dan sosial juga dipersepsikan kurang memuaskan.

Demikian juga Parpol PKB mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan

dalam peristiwa pemerintahan juga dipandang kurang memuaskan. Di satu sisi, Parpol PKB juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga dipandang kurang memuaskan.

i. Partai PKS

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisioner bahwa pandangan Partai Politik PKS mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi dipandang masih kurang bisa dipastikan, sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai dipandang kurang siap oleh Parpol PKS serta kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik, ekonomi dan sosial juga dipersepsikan belum bisa dipastikan.

Demikian juga Parpol PKS mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan juga dipandang belum bisa diketahui. Di satu sisi, Parpol PKS juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga dipandang kurang bisa dipastikan.

j. Partai Nasdem

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisisioner bahwa pandangan Partai Politik Nasdem mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi dipandang telah memuaskan, sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai dipandang memuaskan oleh Parpol Nasdem serta kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik, ekonomi dan sosial juga dipersepsikan juga memuaskan.

Demikian juga Parpol Nasdem mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan juga dipandang memuaskan. Di satu sisi, Parpol Nasdem juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga dipandang telah memuaskan.

Bedasarkan analisa data kuisisioner tentang tanggapan partai politik khusus DIY diketahui memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda mengenai kesiapan para calon non partai yang meliputi persiapan sumber daya manusia dan administratif dimana hal itu akan mempengaruhi beberapa aspek yang ditekankan seperti persiapan mental dalam menghadapi perubahan situasi politik ekonomi dan

sosial di DIY serta persiapan mental dalam mempertanggung jawaban seluruh kewajibannya selama menjabat sebagai kepala daerah di depan DPR DIY.

Beberapa kemampuan dalam mempersiapkan syarat administratif dan sumber daya manusia oleh kepala daerah non partai juga akan mempengaruhi kesiapan tim sukses dan kemampuannya dalam memenangkan para calon non partai pada saat PILKADA.

Pandangan yang berbeda dari setiap partai politik pada proses pencalonan non partai tersebut diatas tidak terlepas dari teori tentang “*Sentimen Anti Partai*” dimana sentimen anti partai merupakan sikap *minor* warga negara terhadap partai politik. Pada umumnya sikap ini muncul sebagai respon warga negara terhadap ketidak puasan penampilan partai politik dalam pemerintahan, pengelolaan partai dan partai di akar rumput. Hal itu merupakan hasil dari ketidakyakinan diantara janji-jani, label ideologi dan pidato politik.

Beberapa hal lain, sentimen anti partai juga menyangkut tanggapan warga negara terhadap kegagalan yang sebenarnya dari partai dan elit politik dalam menjalankan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sebagian warga negara menginginkan adanya PILKADA dengan calon non partai sehingga diharapkan semua aspirasi masyarakat dapat terealisasi melalui PILKADA tersebut. Namun, beberapa partai politik beranggapan bahwa pencalonan non partai pada PILKADA terutama di DIY masih

memerlukan proses observasi yang mendalam mengenai beberapa syarat dari para calon non partai dan hal tersebut mempengaruhi perbedaan tanggapan partai politik khusus DIY mengenai proses pencalonan partai di PILKADA.

2. Tanggapan Komisi Pemilihan Umum DIY Mengenai Proses Pencalonan Non Partai

Komisi Pemilihan Umum Pusat Yogyakarta (KPUP) merupakan alat pemerintah DIY yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan PILKADA terutama PILKADA yang berasal dari calon non partai sehingga KPU harus mempersiapkan segala kewenangan dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsinya untuk kelancaran proses PILKADA dari calon non partai berdasarkan PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati secara tepat untuk menghindari kasus hukum dari para pendukung calon non partai maupun dari golongan partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari hasil kuisisioner bahwa pandangan KPU mengenai proses pencalonan non partai di DIY dari segi persiapan kemampuan kepemimpinan dan administrasi dipandang telah memuaskan, sedangkan pada kemampuan calon non partai dalam menghadapi kemungkinan demonstrasi dan konflik kebijakan antar partai dipandang telah memuaskan oleh KPU serta kemampuan calon non partai dalam menghadapi konflik politik, ekonomi dan sosial juga dipersepsikan telah memuaskan.

Demikian juga KPU mengungkapkan bahwa persiapan calon non partai dalam menghadapi DPR untuk mempertanggungjawabkan jabatan di DIY serta menghadapi kesalahan dalam peristiwa pemerintahan juga dipandang telah memuaskan. Di satu sisi, KPU juga menyatakan bahwa kemampuan tim sukses oleh calon non partai dalam menghadapi hitung cepat di Pilkada di DIY juga dipandang telah memuaskan

Berdasarkan hasil analisa tabel diatas dihubungkan dengan hasil wawancara dengan Ketua KPU DIY dapat disimpulkan bahwa KPU merupakan lembaga pemerintah di DIY yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pencalonan non partai di PILKADA DIY. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan hasil yaitu sebagian besar anggota KPU Yogyakarta memberikan pandangan bahwa pencalonan non partai di DIY dipandang sebagai suatu PILKADA yang positif karena diharapkan Kepala Daerah yang berasal dari non partai akan mampu melaksanakan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara maksimal.

Pandangan KPU mengenai persiapan calon non partai dari segi Sumber Daya Manusia dan Administratif telah memenuhi persyaratan. Sedangkan kemampuan kepemimpinan beserta persiapan menghadapi konflik politik ekonomi dan sosial juga dipandang oleh KPU telah memenuhi syarat. Disatu sisi KPU juga memberika pandangan bahwa kemampuan tim sukses dalam memenangkan pencalonan non partai di PILKADA DIY juga telah memuaskan.

